

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Triwulan IV KPU Pasaman Barat Per 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp. 0,-**

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.76.180.249.127,-** atau mencapai 97.0 %, Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2024 Semua terdiri atas Belanja APBN Dana BA 076

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Oktober 2024.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp. 8.219.373.898,-** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp. 6.236.887.767,-**, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp. 1.982.486.131,-**, Piutang Jangka Pendek (neto uang muka dari KPPN) sebesar **Rp. 0,-** dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar **Rp. (3.048.658.900,-)**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp. 8.219.373.898,-**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.0,-**, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar **Rp. 78.683.254.901,-** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp. (78.683.254.901,-)**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp. 13.898.913.235,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp. (78.683.254.901,-)** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp 0,-** dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp.73.011.349.159,-** kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar **Rp.(5.679.690.742,)** sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp.8.219.222.493,-**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun Anggaran 2024 disusun dan disajikan dengan Basis Akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK SEMESTER IV YANG BERAKHIR 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATA TAN	31 Desember 2024		% thd Anng	'31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1.				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	-	0.00	-
Jum Pendpt Negara & Hibah		-	-	0.00	-
B. Belanja Negara	B.2.				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	2,841,853,000	2,839,617,589	99.92	2,592,186,225
2. Belanja Barang	B.2.2.	75,869,525,000	73,340,631,538	96.67	19,755,340,090
3. Belanja Modal	B.2.3.	2,400,000	-	0.00	358,550,000
4. Belanja Sosial	B.2.4.	-	-	0.00	-
C. Pinjaman dan Hibah	B.3				
1. Belanja Pegawai	B.3.1.	-	-	0.00	-
2. Belanja Barang	B.3.2.	-	-	0.00	-
3. Belanja Modal	B.3.3.	-	-	0.00	-
4. Belanja Sosial	B.3.4.	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja Negara		78,713,778,000	76,180,249,127	96.78	22,706,076,315

II. NERACA

NERACA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
PER 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.2	6,104,887,767	10,400,151,405
Belanja di bayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	132,000,000	308,000,000
Persediaan	C.1.3	0	923,664,379
Jumlah Aset Lancar		6,236,887,767	11,631,815,784
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2.1	150,000,000	150,000,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	3,216,789,103	3,216,789,103
Gedung dan Bangunan	C.2.3	1,664,355,928	1,664,355,928
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.2.4	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	0	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.6	0	0
Akumulasi Penyusutan	C.2.7	(3,048,658,900)	(2,763,896,175)
Jumlah Aset Tetap		1,982,486,131	2,267,248,856
Aset Lainnya	C.2		
Aset Lain-lain	C.2.8		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	C.2.9		
Jumlah Aset Lainnya			341,410,400
JUMLAH ASET		8,219,373,898	14,240,475,040
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.3		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.3.1	151,405	341,410,400
Utang Yang Belum Ditagihkan		151,405	
Hibah yang Belum disahkan		0	
Uang Muka dari KPPN	C.3.2	0	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		151,405	341,410,400
JUMLAH KEWAJIBAN		151,405	341,410,400
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.4		
Cadangan Persediaan	C.4.1		
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.4.2		
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR			
Ekuitas Dana Investasi			
Diinventasi Dalam Aset Tetap	C.4.3		
Diinventasi Dalam Aset Lainnya	C.4.4		
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		8,219,222,493	
JUMLAH EKUITAS DANA		8,219,222,493	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		8,219,373,898	14,240,475,040

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 Dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	0	
JUMLAH PENDAPATAN		0	
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2,839,617,589	2,592,186,225
Beban Persediaan	D.3	2,042,243,049	0
Beban Jasa	D.4	67,857,867,874	16,877,774,090
Beban Pemeliharaan	D.5	59,518,588	154,638,209
Beban Perjalanan Dinas	D.6	5,599,245,076	2,059,290,863
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	284,762,725	270,793,451
Beban Perjalanan Dinas	D.10	0	0
Jumlah Beban Operasional		78,683,254,901	21,954,682,838
JUMLAH BEBAN		78,683,254,901	21,954,682,838
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(78,683,254,901)	(21,954,682,838)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		0	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	
Penadapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(78,683,254,901)	(21,954,682,838)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		0	0
Bebas Perjalanan Dinas		0	0
Bebasn Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(78,683,254,901)	(21,954,682,838)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER TANGGAL 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	13,898,913,235	2,173,413,107
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(78,683,254,901)	(21,954,682,838)
KOREKSI YANG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.4	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E.5	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.6	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.7	0	0
Koreksi Antar Reklafikasi	E.8	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		73,003,564,159	33,680,182,966
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(5,679,690,742)	11,725,500,128
EKUITAS AKHIR		8,219,222,493	13,898,913,235

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

UUD 1945 pasal 22 E menyatakan bahwa *"Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"*. Amanat konstitusi tersebut adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah :

1. Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
2. Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
3. Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas, telah disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2010-2014 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010. Rencana Strategis (Renstra) KPU tahun 2010-2014 disusun sebagai acuan bagi :

1. Penyusunan Renstra unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Komisi Pemilihan Umum;
3. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan antar penyelenggara Pemilu di tingkat Pusat dan Daerah (KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota) serta pemangku kepentingan lainnya ;
4. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum.
5. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Basis

Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4 DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengukur dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

**Kebijakan
Akuntansi**

A.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester 3 Tahun 2024 ini mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

**Pendapatan-
LRA**

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO****(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan *atau* Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Non Kegiatan Operasional Lainnya
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

Belanja**(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban ; terjadinya konsumsi aset ; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang***Jangka******Panjang*****Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya**Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Penyisihan**Piutang Tak
Tertagih****(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

**Penyusutan
Aset Tetap**

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan Akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PPNo.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Oktober 2016 yang berbasis *cashtowardaccrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.

Selama periode berjalan pada Triwulan IV Tahun anggaran 2024 ini, KPU Kabupaten Pasaman Barat telah menerima 15 (Lima Belas) kali Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Dan 21 (Dua Puluh Satu) Kali revisi POK Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan dan Pengurangan pagu anggaran atas adanya kegiatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja sebagai berikut :

TAHUN 2024	
ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
-	-
-	-
-	-
	2,841,853,000
33,160,541,000	75,869,525,000
-	2,400,000
-	-
-	-

Realisasi**Pendapatan****Negara dan Hibah****Rp.0,-****B.1 PENDAPATAN**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.0,-** sehingga Tidak terdapat Pendapatan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat baik terdiri dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN, Jasa, dan Pendapatan Lain-lain (Penjualan Aset yang sudah dijual/lelang).

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2023		
	Anggaran	Pendapatan	% Real Angg.
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
2. Pendapatan Jasa	-	-	-
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada periode 31 Desember 2024 tidak sama dengan realisasi pendapatan dari PNBP yang berakhir 31 Desember 2023.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI Per 31 Desember 2024	REALISASI Per 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	0.00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0.00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0.00
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	-	-	0.00

B.2. BELANJA**Realisasi Belanja****Rp.76.180.249.127,-**

Realisasi belanja instansi pada per 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp.76.180.249.127,-** atau **97.00%** dari anggaran belanja sebesar Rp.78.713.778.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja**Per 31 Desember 2024*

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2,841,853,000	2,839,617,589	100
Belanja Barang	75,869,525,000	73,340,631,538	97
Belanja Modal	2,400,000	-	-
Bantuan Sosial	-	-	-
Pinjaman dan Hibah	-	-	-
Total Belanja Kotor	78,713,778,000	76,180,249,127	97
Pengembalian Belanja	-	-	-
Belanja Netto	78,713,778,000	76,180,249,127	97

Dibandingkan dengan per 31 Desember 2024 realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami Peningkatan dari jumlah besaran belanja sebesar **31 %** dibandingkan realisasi belanja periode sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan anggran untuk Pemilu Tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN	Desember	REALISASI PER 31 Desember 2023	NAIK (TURUN) %
BELANJA NEGARA	0	0	-
Belanja Pegawai	2,839,617,589	2,592,186,225	-
Belanja Barang	73,340,631,538	19,755,340,090	-
Belanja Modal	-	358,550,000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
HIBAH	-	-	-
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
JUMLAH BELANJA	76,180,249,127	22,706,076,315	-

*Belanja Pegawai**Rp. 2.839.617.589,-***B.2.1. BELANJA PEGAWAI**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.2.839.617.589,-** dan **Rp. 2.592.186.225,-** Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 mengalami Peningkatan sebesar 30 % dari realisasi belanja per 31 Desember 2023.

Belanja Barang

Rp.75.869.525.000,-

B.2.2. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan per 31 Oktober 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.73.340.631.538,-** dan **Rp. 19.755.340.090,-** Realisasi Belanja Barang per per 31 Desember 2024 mengalami Peningkatan yang signifikan dibanding realisasi Belanja Barang per per 31 Desember 2023.

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 DES 2024	REALISASI PER 31 DES 2023	Naik (Turun) %
BELANJA NEGARA			
Belanja Barang Operasional	-	-	
Belanja Barang Non Operasional	-	-	
Belanja Barang dan Jasa	73,340,631,538	19,755,340,090	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	-	-	-
Jumlah	73,340,631,538	19,755,340,090	-
HIBAH			
Belanja Barang Operasional	0	0	-
Belanja Barang Non Operasional	-	0	-
Belanja Barang Persediaan	-	-	-
Jumlah	0	-	-
JUMLAH BERSIH	73,340,631,538	19,755,340,090	-

Belanja Modal Rp.

2.400.000,-

B.2.3. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp.0,-** Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 terjadi perubahan sebesar **Rp.90 %** dibanding realisasi dengan Belanja Modal per 31 Oktober 2023 yaitu sebesar **Rp.358.550.000,-**

Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN	REALISASI PER 31 DES 2024	REALISASI PER 31 DES 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	358,550,000	0.00
JUMLAH BELANJA KOTOR			0.00
Pengembalian	-	-	0.00
JUMLAH BELANJA	-	358,550,000	0.00

Belanja Modal
Tanah Rp. 0,-

B.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan **Rp.150.000.000,-**.

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2024 Turun 100 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah **Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023**

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Des 2024	REALISASI PER 31 Des 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	150,000,000	0.00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	0.00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	-	-	0.00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	150,000,000	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja Bersih	-	150,000,000	100%

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp. 0,-

B.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan sebesar **Rp. 0,-** atau tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan **Rp.0 %**.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Per 31 Oktober 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Des 2024	REALISASI PER 31 Des 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	0.00
Belanja Modal BLU	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja Bersih	-	-	0.00

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp. 0

B.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sama nol persen dibandingkan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi pagu anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Des 2024	REALISASI PER 31 Des 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0.00

Belanja Modal
Jalan, Irigasi,
dan Jaringan Rp.
0

B.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Oktober 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 sama sebesar 0 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Oktober 2023. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya alokasi pagu anggaran belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Oktober 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI PER 31 Des 2024	REALISASI PER 31 Des 2023	Naik (Turun) %
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	0.00
Jumlah Belanja Kotor	-	-	0.00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0.00
Jumlah Belanja Bersih	-	-	0.00

Belanja Modal
Lainnya Rp. 0

B.2.3.5. Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2024 sama sebesar **0 %** dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023.

Belanja Bantuan
Sosial Rp. 0

B.2.4. BELANJA BANTUAN SOSIAL

Peroide per 31 Desember 2024 dan periode per 31 Desember 2023, KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak menerima alokasi Belanja Bantuan Sosial.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA*Kas di**Bendahara**Pengeluaran Rp
0,-***C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023, masing-masing adalah sebesar **Rp. 0,-** yang merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP, yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
Bank BRI	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi UP	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di**Bendahara**Penerimaan**Rp.
6.104.897.767***C.1.1. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 6.104.897.767,-** dan **Rp. 10.400.151.045,-**. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak .

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
Bank BSI	6,104,897,767	10,400,151,405
Uang Tunai	-	-
Jumlah	6,104,897,767	10,400,151,405

C.1.2. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

*Kas Lainnya
dan Setara kas
Rp.
6.104.897.767,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp. 6.104.897.767,-** dan **Rp. 10.400.151.405,-**

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP / TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Per 31 Oktober 2024 dan Per 31 Desember 2023

Persediaan	31 Des 2024	31 Des 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	6,104,897,767	10,400,151,405
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	6,104,897,767	10,400,151,405

C.1.2.1. PIUTANG PNB

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Piutang PNB, baik itu Per 31 Desember 2024 maupun Per 31 Desember 2023.

**C.1.2.2. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/
TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)**

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), baik itu per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023.

C.1.2.3. BAGIAN LANCAR TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, baik itu per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023.

C.1.2.4. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH – PIUTANG LANCAR

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar, baik itu per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023.

C.1.2.5. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Beban Dibayar di Muka, baik itu per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023.

C.1.2.6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Pendapatan yang Masih Harus Diterima, baik itu per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

C.1.3. PERSEDIAAN

Persediaan
Rp.0,-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023. masing-masing adalah sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 923.664.379,-**

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 Maupun per 31 Desember 2023. adalah sebagai berikut :

Rincian Persediaan

Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No	Persediaan	31 Des 2024	31 Des 2023
1	Barang Konsumsi	-	-
2	Barang untuk Pemeliharaan	-	-
3	Suku Cadang	-	-
4	Persediaan Lainnya	-	923,664,379
Jumlah		-	923,664,379

C.1.3.1. TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), baik itu per 31 Desember 2024. maupun per 31 Desember 2023.

C.1.3.2. TAGIHAN PENJUALAN ANGSURAN

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Tagihan Penjualan Angsuran, baik itu per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023

C.1.3.3. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH - PIUTANG JANGKA PANJANG

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang, baik itu per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023.

C.2.1. TANAH

Tanah
Rp.150.000.000
,-

Nilai aset tetap berupa hibah tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023. adalah sebesar **Rp. 150.000.000,-**. adanya penambahan atas Hibah tanah maupun penilaian kembali

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	-
Mutasi tambah:		
Hibah	Rp	150,000,000
Mutasi kurang:		
Transfer keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	150,000,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Oktober 2024	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	150,000,000

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah Per 31 Desember 2024

No.	Luas (m2)	Lokasi	Nilai	% Naik / (Turun)
1	3000 (M2)	Pasaman Baru	150,000,000	0
2	-	-	0	0
Jumlah			150,000,000	0

C.2.2. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan
Mesin Rp
3.216.789.103,-
,-

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah **Rp 3.216.789.103,-** dan **Rp 3.216.789.103,-**. Mutasi Nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	3,216,789,103
Mutasi tambah:	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Transfer keluar	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	3,216,789,103
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2024	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	3,216,789,103

Gedung dan
Bangunan Rp
1.664.355.928,-

C.2.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah **Rp 1.664.355.928,-** dan **Rp 1.664.355.928,-**

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	Rp	1,664,355,928
Mutasi tambah:		-
Pengembangan nilai aset		-
Pengembangan melalui KDP		-
Mutasi kurang:		-
-		-
Saldo per 31 Desember 2024	Rp	1,664,355,928
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp	1,664,355,928

Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp 0

C.2.4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**.

Tidak ada mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan.

C.2.5. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap
Lainnya Rp 0

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan.

C.2.6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), baik itu per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 .

Akumulasi**Penyusutan****Aset Tetap Rp**
(3.048.658.900),-**C.2.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023. adalah masing-masing **Rp (3.048.658.900,-)** dan **Rp (2.763.896.175,-)**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**Per 31 Desember 2024*

1	Tanah	Rp 150,000,000	Rp -	Rp 150,000,000
2	Peralatan dan Mesin	Rp 3,216,789,103	Rp -	Rp 3,216,789,103
3	Gedung dan Bangunan	Rp 1,664,355,928	Rp -	Rp 1,664,355,928
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
6	Aset Tetap Lainnya			Rp -
Akumulasi Penyusutan		Rp (3,048,658,900)	Rp -	Rp (2,763,896,175)

C.2. ASET TAK BERWUJUD

KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak memiliki Aset Tak Berwujud, baik itu per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023.

Aset Lain-Lain
Rp.0,-**C.2.8. ASET LAIN – LAIN**

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023. adalah masing-masing **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Aset lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	
Mutasi tambah:	Rp -
Pembelian	Rp -
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	Rp -
Saldo per 31 Desember 2024	Rp -
Akumulasi Penyusutan s.d. Desember 2024	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2024	Rp -

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain tidak ada. rincian aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini

Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp
284.762.725,-

C.2.9. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTIASI ASET LAINNYA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing **Rp.284.762.725-** dan **Rp. 270.793.451,-** Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Per 31 Desember 2024

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	Rp -	Rp -	Rp -
2	Aset Lain-lain		Rp -	Rp -
	Akumulasi Penyusutan	Rp -	Rp -	Rp -

Uang muka
dari KPPN Rp.
300.000.000,-

C.3.2. UANG MUKA DARI KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp.0,-** dan Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Muka (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok Aset Lancar.

C.3.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga Rp.151.405,-

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp.151.405,-** dan **Rp.0,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Rincian Utang kepada Pihak Ketiga**Per 31 Desember 2024*

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -	
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	Rp 151,405	
3	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp -	
Total		151,405	

C.3.2.1 PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp. 0

Nilai Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**. Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan PNBPN, pengembalian belanja, serta pungutan / potongan pajak yang belum disetorkan ke kas negara pada tanggal 31 Desember 2024.

C.3.2.2. PENDAPATAN YANG DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Yang Diterima Dimuka Rp. 0

Nilai Pendapatan Yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Pendapatan diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/ jasa belum diserahkan.

C.3.2.3. BEBAN YANG HARUS DIBAYAR

Beban Yang Harus Dibayar Rp. 0

Beban Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

Ekuitas Rp
8.219.222.493,-

C.4. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 8.219.222.493,-** dan **Rp. 13.898.913.235,-**

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pendapatan
PNBP Rp 0,-

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Oktober 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp.0,-** dan **Rp. 0,-**. Pendapatan tersebut terdiri dari :

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN	REALISASI 31 Des 2024	REALISASI 31 Des 2023	NAIK (TURUN) %
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	0.00
2. Pendapatan Jasa	-	-	0.00
3. Pendapatan Iuran dan Denda	-	-	0.00
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	0.00
Jumlah Pendapatan	-	-	0.00

Beban Pegawai
Rp.2.839.617.58
9,-

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.839.617.589,-** dan **Rp.2.592.186.225,-**. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Gaji dan Tunjangan	2,839,617,589	2,592,186,225	9.55
Beban TKG	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	2,839,617,589	2,592,186,225	9.55

*Beban**Persediaan Rp**2.042.243.049,-***D.3 BEBAN PERSEDIAAN**

Jumlah Beban Persediaan pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 2.042.243.049,-** dan **Rp. 0,-**

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Persediaan**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Desember	Per '31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	-	-	0,00
Pita Cukai, Materai dan Legis	-	-	0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	0,00
Beban Persediaan Lainnya	2,042,243,049	-	-
Jumlah	2,042,243,049	-	-

*Beban Jasa**Rp.67.857.867.8**74,-***D.4 BEBAN BARANG DAN JASA**

Jumlah Beban Jasa pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.67.857.867.874,-** dan **Rp.16.877.774.090,-**

Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk per 31 Desember 2024 maupun per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang dan Jasa**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Per '31 Desember 2024	Per '31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan Jasa	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	67,857,867,874	16,877,774,090	-
Beban Barang	-	-	-
Jumlah	67,857,867,874	16,877,774,090	302.05

*Beban**Pemeliharaan**Rp 59.518.588,-**,-***D.5 BEBAN PEMELIHARAAN**

Beban Pemeliharaan pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.59.518.588,-** dan **Rp.154.638.209,-** Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Pemeliharaan**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	Per '31 Desember 2024	Per '31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan	59,518,588	154,638,209	(61.51)
Jumlah	59,518,588	154,638,209	(61.51)

*Beban**Perjalanan**Dinas Rp**5.599.245.076**,-***D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS**

Beban Perjalanan Dinas pada per 30 Desember 2023 dan per 30 Desember 2022. adalah masing-masing sebesar **Rp.5.599.245.076,-** dan **Rp. 2.059.290.863,-** Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024. maupun per 31 Desember 2023. adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Perjalanan Dinas**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	PER '31 Desember 2024	PER '31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1,544,401,531	-	100.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	640,525,394	-	100.00
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	3,168,733,993	-	100.00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	245,584,158	-	100.00
Jumlah	5,599,245,076	-	100.00

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Rp 0.-

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada per 31 Desember 2024 Maupun per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-** Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau Jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024 Maupun per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat**Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	PER'31 Desember 2024	PER'31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Peralatan dan Mesin yang diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	-
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	0	0	-
Jumlah	0	0	-

Beban Bantuan Sosial Rp 0

D.8 BEBAN BANTUAN SOSIAL

Beban Bantuan Sosial pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/ barang atau Jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif

Rincian Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER '31 Desember 2024	PER '31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	-
Beban Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	-
Beban Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	-
Jumlah	0	0	-

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.
284.762.725,-*

D.9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.4.762.725,-** dan **Rp. 270.793.451,-**. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	PER '31 Desember 2024	PER '31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	284,762,725	270,793,451	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	284,762,725	270,793,451	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	284,762,725	270,793,451	-

Beban**Penyisihan****Piutang Tak****Tertagih Rp 0****D.10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidak tertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	PER '31 Desember 2024	PER '31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Surplus/Defisit**dari Kegiatan****Non****Operasional****Rp****(78.683.254.901****)****D.11 KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah Beban Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp (78.683.254.901),-** dan **Rp (21.954.682.838),-** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Kegiatan Non Operasional**Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	PER 31 Desember 2024	PER 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	0.00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	-	0.00
Pendapatan dari Kegiatan Operasional lainnya	-	-	0.00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	-	-	0.00
Penjualan Alat Kantor	-	-	0.00
Defisit Selisih Kurs	-	-	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	0.00

Pos Luar Biasa

Rp. 0

D.12 POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Jumlah Beban Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023.

adalah masing-masing sebesar **Rp 0,-** dan **Rp 0,-**. Rincian Pos Luar Biasa per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa

Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

URAIAN	PER 31 Desember 2024	PER 31 Desember 2023	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	-	-	0
Beban Perjalanan Dinas	-	-	0
Beban Persediaan	-	-	0
Jumlah	-	-	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.

13.898.913.235,-

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp.13.898.913.235,-** dan **Rp. 2.173.413.107,-**

Defisit LO

Rp

(78.683.254.901,-)

E.2 SURPLUS/ DEFISIT LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp (78.683.254.901,-)** dan **Rp (21.954.682.838,-)** Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

Koreksi Nilai

Persediaan Rp 0

E.3 KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Rp 0,-

E.4 KOREKSI NILAI ASET TETAP

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp.0,-**.

Koreksi Atas
Beban Rp 0

E.5 KOREKSI ATAS BEBAN PERSEDIAN

Koreksi Atas Beban persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi kurang atas beban untuk periode per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Koreksi Atas
Pendapatan Rp 0

E.6 SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan aset tetap yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan.

Koreksi tambah atas aset tetap untuk periode per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Koreksi Atas
Hibah Masuk/
Keluar Rp 0

E.7 KOREKSI ATAS HIBAH MASUK/ KELUAR

Koreksi Atas Hibah Masuk/ Keluar merupakan pencatatan atas hibah masuk/ keluar berupa hibah barang. Koreksi pencatatan aset tetap untuk untuk periode per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 0,-** dan **Rp. 0,-**.

Ekuitas Akhir
Rp.8.219.222.493,-

E.8 EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp. 8.219.222.493,-** dan **Rp.13.898.913.235,-**.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA**F.1 KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, KPU Kabupaten Pasaman Barat Tidak terdapat kejadian kejadian penting setelah tanggal Neraca seperti bencana alam, kebakaran ataupun kesalahan manusia.

Realisasi anggaran belanja pada satuan kerja KPU Kabupaten Pasaman Barat periode 1 Januari s/d 31 Desember 2024 Belum mencapai target yang diembankan oleh KPU RI selaku eselon 1 yakni sebesar **99.00 %** untuk realisasi belanja pegawai dan operasional pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk realiasi belanja keseluruhan yakni sebesar **97.00 %**. Hal tersebut terjadi karena Banyak Kegiatan Yang Belum Terlaksana berdasarkan pagu anggaran pada belanja Pegawai dan Belanja Barang Lainnya.

1. Periode 1 Januari Sampai 31 Desember 2024 KPU Kabupaten Pasaman Barat menerima satu kali DIPA Awal dan Dipa Revisi 15 (Lima Belas) kali DIPA Revisi
2. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 01/ HK. 03.2/ 1312 / 2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran : ZAIDI, SH

Pejabat Pembuat Komitmen : ZAIDI, SH

Pejabat Penandatanganan/ : YULIA WARTA NINGSIH, SH

Penguji SPM

Bendahara : AHMADI

Pembantu Bendahara : HAFIZH AMINY

Pembantu Bendahara : DIAN SRI RAHMA PUTRI. A.Md

Pembantu Bendahara : YENI SUSANTI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2024

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Singkatan.....	iv
PernyataanTanggung Jawab.....	v
Ringkasan Laporan Keuangan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	44
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	55
VI. Lampiran dan Daftar	

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Komisi Pemilihan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tanggal 30 Desember 2013 dan Peraturan Kementerian Keuangan No. 222/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Simpang Empat, 31 Desember 2024
Kuasa Pengguna Anggaran



ZAIDI, SH
NIP. 196710111997031001